

TESIS

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN**
Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Disusun Oleh:

NAMA : WAHYU WIBOWO PARULIAN
NIM : 1863002130
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr.AP)



**POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, 2020**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA
2020**

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Wahyu Wibowo Parulian
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863002130
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tugas Akhir/Tesis : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Lingkup DITJEN PHPL KLHK.

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, Oktober 2020
Pembimbing Tesis



(Dr. R. Luki Karunia, MA)

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : WAHYU WIBOWO PARULIAN
NOMOR POKOK MAHASISWA : 1863002130
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TUGAS AKHIR/TESIS : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN PHPL KLHK.

Telah mempertahankan tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Terapan Adminstrasi Pembangunan Negara, Politeknik Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Oktober 2020
Pukul : 16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Bambang Riyatno 
Sekretaris : Dr. Asropi, M.Si
Anggota : Dr. Hamka, MA
Pembimbing Tugas Akhir/Tesis : Dr. R. Luki Karunia, MA

Bambang Riyatno
Asropi
Hamka
R. Luki Karunia

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Wibowo Parulian
NPM : 1863002130
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Lingkup Ditjen PHPL KLHK merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Oktober 2020
Penulis,

Wahyu Wibowo Parulian

METERAI TEMPAL
TGL. 20
DD9-A0AHE721004465
6000
ENAM RIBU RUPIAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat TUHAN atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.” Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini, baik secara moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Dr. R. Luki Karunia, MA atas arahan dan bimbingan ilmu, tenaga, pikiran serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan.
2. Dr. Hamka, MA, yg telah memberikan masukan dan saran saat Seminar Proposal, Seminar Hasil Tesis dan Ujian Tesis.
3. Direktur, Dosen-Dosen Program Magister Administrasi Pembangunan Negara khususnya Dosen Manajemen Keuangan Negara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dalam mendalami Ilmu Administrasi, serta semua civitas akademis Politeknik STIA LAN Jakarta atas dukungan dan bantuannya.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Terapan Manajemen Keuangan Negara Angkatan Tahun 2018 yang selalu mendukung dan memberi semangat sampai akhir semester.

5. Seluruh Staf Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya rekan-rekan lingkup Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan yang selalu memberi dukungan dan bantuannya.
6. Orang tua saya Alm. Bapak Sarmono dan Hj. Ibu Herlina Hutagaol serta Kakak, Abang, Adik dan Seluruh Kelurga saya semuanya yang selalu memberikan dukungan & doanya.
7. Kepada semua pihak yg telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, wawasan dan ilmu maupun pustaka yg ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan pengembangan lanjut agar lebih bermanfaat. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi.

JAKARTA
Jakarta, Oktober 2020

Wahyu Wibowo Parulian

PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

WAHYU WIBOWO PARULIAN, 1863002130
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA DITJEN PHPL KLHK.
97 halaman, 5 bab, 44 tabel, 3 gambar, 6 lampiran
Daftar Pustaka : 18 buku dan peraturan, 11 jurnal dan artikel

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap terhadap Akuntabilitas Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampel dalam penelitian sebanyak 84 responden yang ditetapkan secara probability sampling. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas keuangan pada direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas Keuangan

APPLIED MASTER PROGRAM
STATE DEVELOPMENT ADMINISTRATION
POLYTECHNIC HIGH SCHOOL OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
STATE ADMINISTRATIVE INSTITUTIONS

ABSTRACT

WAHYU WIBOWO PARULIAN, 1863002130
THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM,
USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND HUMAN
RESOURCES COMPETENCY ON FINANCIAL ACCOUNTABILITY
IN THE DIRECTORATE GENERAL SUSTAINABLE PRODUCTION
FOREST MANAGEMENT
97 pages, 5 chapters, 44 tables, 3 pictures, 6 attachments
Bibliography: 18 books and regulations, 11 journals and articles

This study aims to examine and analyze the effect of internal control systems, the use of information technology and human resource competence on financial accountability at the Directorate General of Sustainable Production Forest Production Development. Ministry of Environment and Forestry. The sample in the study was 84 respondents who were determined by purposive sampling. Data were analyzed using regression analysis. The results showed that the internal control system, the use of information technology and the competence of human resources partially and simultaneously had a positive and significant effect on financial accountability at the Directorate General of Sustainable Production Forest Production, Ministry of Environment and Forestry.

Keywords: Internal Control System, Utilization of Information Technology, Human Resources, Financial Accountability

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Abstrak	ii
Abstrack	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
 Bab I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
 Bab II Kerangka Teori	 11
A. Akuntabilitas.....	11
1.1 Akuntabilitas Publik	13
1.2 Akuntabilitas Keuangan.....	14
2 Pengelolaan Keuangan Negara.....	16
2.1 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.....	17
2.2 Pengawasan.....	18
2.3 Pengawasan Intern Pemerintah.....	20
2.4 Sistem Pengendalian Intern	21
3 Pemanfaatan Tekhnologi Informasi.....	23
3.1 Pengertian Sistem Informasi.....	27
3.2 SIMPONI.....	29
3.3 SIPNBP.....	30
4 Sumber Daya Manusia	31

4.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Definisi Operasional Variabel dan Indikatornya	40
D. Kerangka Berpikir.....	45
E. Hipotesis Penelitian	48
 Bab III Metodologi Penelitian	 49
A. Metode Penelitian	49
B. Populasi dan Sample dan Teknik Sampling.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data	50
D. Instrumen Penelitian	52
1 Pengujian Instrumen.....	55
1.1 Uji Validitas.....	55
1.2 Uji Realibilitas.....	57
2 Pengukuran Instrumen.....	57
3 Hasil Pengukuran.....	59
3.1 Karakteristik Responden.....	59
3.2 Persepsi Responden.....	61
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	64
1 Statistik Deskriptif.....	64
2 Pengujian Asumsi Klasik.....	64
3 Pengujian Hipotesis.....	66
3.1 Uji Parsial.....	66
3.2 Uji Simultan.....	67
3.3 Kontribusi Efektif dan Relatif.....	68
 Bab IV Hasil Penelitian.....	 69
A. Deskripsi Data	69
1 Analisis Statistik Deskriptif.....	70
B. Pengujian Hipotesis.....	71

1 Uji Persyaratan.....	71
1.1 Uji Normalitas.....	71
1.2 Uji Heteroskedastisitas.....	72
1.3 Uji Multikolonieritas.....	74
C. Analisis Penelitian.....	74
1 Pengaruh SPI terhadap AK.....	74
2 Pengaruh SIPNBP terhadap AK.....	77
3 Pengaruh KSDM terhadap AK.....	79
4 Pengaruh SPI, SIPNBP dan KSDM terhadap AK.....	82
D. Pembahasan Hasil Penelitian dan Keterbatasan Penelitian.....	86
1 Pengaruh SPI terhadap AK.....	87
2 Pengaruh SIPNBP terhadap AK.....	88
3 Pengaruh KSDM terhadap AK.....	89
4 Pengaruh SIPNBP terhadap AK.....	89
E. Keterbatasan Penelitian.....	90
 BAB V Kesimpulan dan Saran.....	 92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
 Daftar Pustaka.....	 95
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Judul

- Lampiran I Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran II Tanda Terima Penelitian
- Lampiran III Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran IV Kuesioner Penelitian
- Lampiran V Hasil Pengujian Statistik
- Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LK KLHK Tahun 2014 - 2018	3
1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Tidak Dapat Diidentifikasi 2015-2017	4
1.3	PNBP yang Belum Dapat Diidentifikasi Tahun 2018	7
2.1	Penelitian Terdahulu	39
2.2	Operasional Variabel dan Indikator	44
3.1	Objek Penelitian	50
3.2	Data Kuesioner Responden	51
3.3	Instrumen Pengukuran Variabel AK (Y)	53
3.4	Instrumen Pengukuran Variabel SPI (X1)	53
3.5	Instrumen Pengukuran Variabel SIPNBP (X2)	54
3.6	Instrumen Pengukuran Variabel KSDM (X3)	54
3.7	Uji Validitas Instrumen Variabel AK	55
3.8	Uji Validitas Instrumen Variabel SPI	56
3.9	Uji Validitas Instrumen Variabel SIPNBP	56
3.10	Uji Validitas Instrumen Variabel KSDM	56

3.11	Uji Realibilitas	57
3.12	Karaktersitik Responden Berdasarkan Unit Kerja	60
3.13	Karaktersitik Responden Berdasarkan Jabatan	60
3.14	Karaktersitik Responden Berdasarkan Masa Kerja	61
3.15	Persepsi Responden atas AK (Y)	61
3.16	Persepsi Responden atas SPI (X1)	62
3.17	Persepsi Responden atas SIPNBP (X2)	63
3.18	Persepsi Responden atas KSDM (X3)	63
4.1	Analisis Deskriptif Varibael AK, SPI, SIPNBP dan KSDM	70
4.2	Kolmogorov Simirnov Test	72
4.3	Uji Gletser	73
4.4	Uji Multikolinearitas	74
4.5	Analisis Deskriptif Varibael SPI dan AK	74
4.6	Coeffisient Variabel SPI dan Variabel AK	75
4.7	ANOVA Variabel SPI dan Variabel AK	76
4.8	Model Summary Koefisein Regresi Variabel SPI dan AK	77
4.9	Analisis Deskriptif Varibael SIPNBP dan AK	77
4.10	Coeffisien Variabel SIPNBP dan Variabel AK	77
4.11	ANOVA Variabel SIPNBP dan Variabel AK	78
4.12	Model Summary Variabel SIPNBP dan Variabel AK	79
4.13	Analisis Deskriptif Varibael KSDM dan AK	80
4.14	Coeffisien Variabel KSDM dan AK	80
4.15	ANOVA Variabel KSDM dan Variabel AK	81
4.16	Model Summary Variabel KSDM dan AK	82
4.17	Analisis Deskriptif Varibael SPI, SIPNBP dan KSDM dan AK	83
4.18	ANOVA Variabel SPI, SIPNBP, KSDM dan AK	83

4.19	Model Summary Koefisein Regresi Variabel SPI, SIPNBP, KSDM dan AK	84
4.20	Kontribusi	85
4.21	Coeffisien Variabel SPI, SIPNBP, KSDM dan AK	85

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka berpikir	47
4.1	Normal Plot	72
4.2	Scater Plot Heteroskedastisitas	73

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Paket undang-undang dibidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan membawa konsekuensi mengenai pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan negara benar-benar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau lebih dikenal dengan istilah Good Governance.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam good governance. Konsep ini bukan merupakan hal baru di Indonesia. Karena hampir seluruh instansi maupun lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas dalam menjalankan fungsi administratif dan kepemerintahannya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas, khususnya dalam akuntabilitas keuangan, mewajibkan setiap pengguna anggaran yang merupakan unit entitas akuntansi pemerintahan dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyelenggaraan akuntansi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas aktivitas pengelolaan sumber daya keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam mewujudkan tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2018. Masih seringnya dijumpai kondisi-kondisi yang belum sesuai harapan, seperti tidak tertibnya pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP serta rendahnya penerimaan negara menjadi alasan terbitnya Inpres tersebut. Permasalahan ini masih menjadi topik pembahasan yang hangat baik di instansi pengelola maupun di berbagai media massa beberapa tahun terakhir. Permasalahan lain adalah masih banyaknya laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), atau setidaknya wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pemeriksaan keuangan negara terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Lingkup

pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara, dan yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan pada standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat yang dimaksud sebagai pengawasan intern pemerintah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas laporan keuangan yang disajikan, terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksaan, yaitu: *wajar tanpa pengecualian (WTP)*; *wajar dengan pengecualian (WDP)*; *tidak wajar (TW)*; *tidak memberikan pendapat (TMP)*.

Berkaitan dengan opini atas laporan keuangan pemerintah, BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2014 - Tahun 2018

No	Tahun	Opini
1	2014	WDP
2	2015	WDP
3	2016	WDP
4	2017	WTP
5	2018	WTP

Tabel.I.1 ; Sumber bpk – ri 2014-2018

Pada tabel 1.1 diketahui bpk-ri memberi opini wajar dengan pengecualian atas LK KLHK pada tahun 2014-2016. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2015-2017 mengungkapkan adanya penerimaan negara yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam (PNBP SDA) yang tidak teridentifikasi. Sedangkan pada tahun 2017-2018 opini yang diperoleh KLHK naik menjadi wajar tanpa pengecualian, kenaikan opini yang diperoleh KLHK sejalan dengan berkurangnya jumlah PNBP yang tidak teridentifikasi dalam LHP BPK-RI Tahun 2018. Pada tabel 1.2 disajikan PNBP Tahun 2015-2017 yang tidak teridentifikasi.

Tabel 1.2
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Tidak Dapat Diidentifikasi
Tahun 2015 s.d 2017

NO	Jenis PNBP	2015		2016		2017		Total
		BP	Simponi	BP	Simponi	BP	Simponi	
1	Dana Reboisasi	1.893.702.868	-	3.082.387.768	-	288.044.386	-	5.264.135.022
2	Provisi Sumber Daya Hutan	5.011.237.919	-	2.761.188.032	-	167.694.756	-	7.940.120.707
3	IIUPH	-	-	13.207.600	-	-	-	13.207.600
4	PNT	-	-	428.514.287	-	19.801.980	-	448.316.267
5	DPEH	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		6.904.940.787		6.285.297.687	-	475.541.122	-	13.665.779.596

Tabel I.2 ; sumber lhp-spi bpk ri 2018

PNBP yang tidak teridentifikasi tersebut menyebabkan ketidakpastian apakah merupakan penerimaan dari sumber Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Izin Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) tahun berjalan atau sebagai penerimaan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya. Hal ini juga akan menyebabkan penyajian nilai PNBP dalam Laporan Operasional dan Piutang Bukan Pajak dalam neraca tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

PNBP yang tidak teridentifikasi tersebut bersumber dari penyetoran oleh wajib bayar melalui rekening Bendahara Penerima. Penerimaan tersebut tidak merincikan secara jelas sesuai dengan kodefikasi sebagaimana yang ditetapkan oleh KLHK, yang seharusnya memasukan 15 digit kodefikasi. Mekanisme penyetoran PNBP SDA kehutanan oleh wajib bayar dilakukan secara self assesment ke Kas Negara melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atau melalui rekening bank yang dikelola oleh bendahara penerimaan. SIMPONI dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang merupakan sistem informasi yang dibuat dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.

Permasalahan yang diungkap BPK RI merupakan permasalahan yang terjadi berulang sejak tahun 2015 hingga 2017, hal ini mengindikasikan permasalahan pada akuntabilitas keuangan, khususnya pada akuntabilitas penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam. Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan perbaikan peran dan fungsi sistem pengendalian intern (SPI) serta merekomendasikan pembenahan penatausahaan PNBP di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL), KLHK.

Sehubungan tidak teridentifikasinya PNBP SDA yang terjadi secara berulang menggambarkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada lingkup Ditjen PHPL, KLHK tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Atas permasalahan tersebut dan mengacu pada rekomendasi BPK RI, Ditjen PHPL,

KLHK berupaya meningkatkan peran dan fungsi SPI agar permasalahan yang sama tidak terjadi kembali. SPI bertujuan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan informasi serta laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pengendalian merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengendalian diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan efisien, efektif, dan ekonomis, sehingga dapat memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan.

Menyikapi rekomendasi BPK RI atas permasalahan terkait tidak teridentifikasinya PNBP SDA, upaya konkret yang dilakukan KLHK melalui Ditjen PHPL dalam melaksanakan pengelolaan PNBP-SDA guna mengatasi permasalahan yang sama tidak terjadi kembali dengan menerapkan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan negara telah diakomodir melalui Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang E-Goverment yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah diterapkan Menteri Keuangan yang menetapkan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi. Dengan penggunaan

teknologi informasi, tugas para pengelola keuangan negara akan semakin terbantu dan dapat menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang akurat dan tepat waktu serta dapat memperbaiki, menyempurnakan dan mewujudkan penatausahaan serta pengelolaan keuangan negara secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Upaya yang dilakukan dengan menghadirkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Sejak tahun 2018 rekening bendahara penerima telah ditutup dan para wajib bayar diwajibkan melakukan pembayaran kewajiban hanya melalui SIPNBP yang terintegrasi dengan SIMPONI sehingga diharapkan penerimaan PNBP Sumber Daya Hutan sudah dapat diidentifikasi seluruhnya. Dengan diterapkannya SIPNBP sebagai media pembayaran bagi para wajib bayar dalam memenuhi kewajibannya telah membawa dampak positif bagi KLHK dan para wajib bayar. SIPNBP yang dikelola Ditjen PHPL KLHK berfungsi sebagai media bagi wajib bayar dalam melakukan penyetoran kewajibannya secara self assesment yang terintegrasi dengan SIMPONI.

Namun pada tahun 2018 permasalahan yang sama masih ditemukan adanya penerimaan yang tidak dapat diidentifikasi. Berdasarkan LHP BPK RI atas LK KLHK diungkap kembali PNBP SDA yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp295.965.837,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
PNBP yang Belum Dapat Diidentifikasi Tahun 2018

No	Jenis PNBP	Realisasi
1	Dana Reboisasi	87.542.625
2	Provisi Sumber Daya Hutan	167.473.431
3	IIUPH	40.949.781
Jumlah		295.965.837

Tabel 1.3 sumber lhp bpk ri 2018

Berdasarkan data kepegawaian Ditjen PHPL KLHK, terdapat 832 orang pegawai, yang ditempatkan pada 6 (enam) unit satker pusat dan 16 (enam belas) unit satker balai. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 289 orang pegawai di unit satker pusat dan 543 di unit satker balai (daerah). Selain itu, Ditjen PHPL juga mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi golongan, pendidikan, usia dan kompetensi. Dukungan jumlah SDM yang cukup diharapkan mampu mewujudkan tujuan organisasi, SDM diharapkan dapat bekerja lebih berkualitas, mampu menerima setiap tantangan dan perubahan yang semakin cepat, dan mampu melakukan terobosan-terobosan baik inovasi maupun regulasi. Terkait permasalahan PNBP yang tidak teridentifikasi, perhatian Ditjen PHPL KLHK atas penempatan pegawai telah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman serta kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pekerjaannya perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikannya namun juga dapat dilihat dari pelatihan-pelatihan yang diikuti dan pengalaman dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terjadi kembali. Dengan penempatan SDM yang sesuai kompetensinya akan mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. Kegagalan SDM dalam memahami dan menerapkan logika terkait pelaksanaan tugas dan fungsi akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari organisasi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum teridentifikasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan

Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 mengakibatkan nilai PNBP yang diperoleh dari sumber daya alam menyebabkan penyajian nilai PNPB dalam Laporan Operasional dan Piutang Bukan Pajak dalam neraca tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Pembahasan pada penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel yang jadi objek penelitian. Dari uraian latar belakang dan dari perbedaan hasil penelitian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK (Ditjen PHPL KLHK), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam peningkatan akuntabilitas keuangan negara pada satker di lingkungan Ditjen PHPL KLHK. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

- 1 Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
- 2 Sistem penerimaan negara bukan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
- 3 Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.
- 4 Secara simultan sistem pengendalian intern, sistem informasi penerimaan negara bukan pajak dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen,yaitu:
 - 4.1 Sistem pengendalian intern hanya berkontribusi sebesar 4,5% atau hanya berkontribusi 10% dari total *R Square* terhadap akuntabilitas keuangan di lingkup Ditjen PHPL, KLHK.
 - 4.2 Sistem informasi penerimaan negara bukan pajak berkontribusi paling besar terhadap akuntabilitas keuangan di lingkup Ditjen PHPL, KLHK, yaitu sebesar 21,5% atau 47,3 dari total *R Square*.

4.3 Sedangkan kontribusi yang diberikan dari variabel kompetensi sumber daya terhadap variabel akuntabilitas keuangan di lingkup Ditjen PHPL, KLHK sebesar 19,4% atau 42,7% dari total *R Square*.

B. Saran

1. Bagi Ditjen PHPL, KLHK
2. Kontribusi sistem pengendalian intern hanya sebesar 4,5% dari nilai R Square terhadap akuntabilitas keuangan, hal ini sesuai dengan persepsi responden terkait indikator variabel SPI atas 10 butir pertanyaan kuesioner penelitian. Pada indikator lingkungan pengendalian, dari 84 responden 15 menyatakan tidak setuju dan 8 responden menyatakan ragu-ragu mengenai peran dan fungsi SPI. Hal ini menggambarkan bahwa tidak semua responden paham dan mengerti tentang peran dan fungsi SPI. Dan pada indikator penaksiran resiko sebanyak 10 dari 84 responden menyatakan ragu-ragu atas peran dan fungsi SPI. Berdasarkan uraian tersebut penulis menyarankan agar peran dan fungsi sistem pengendalian intern perlu ditingkatkan lingkup Ditjen PHPL, KLHK.
3. Agar kompetensi sumber daya manusia di lingkup Ditjen PHPL KLHK semakin baik, penulis menyarankan dapat lebih memperhatikan kompetensi staf sesuai dengan bidangnya, hal ini berdasarkan persepsi responden terkait indikator skills pada variabel kompetensi sumber daya manusia, dari 84 responden 16 menyatakan ragu-ragu atas kompetensi sumber daya manusia.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang akuntabilitas keuangan disarankan untuk:
 - a. Menambahkan variabel lain untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan.
 - b. Memperbanyak jumlah sampel penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.
 - c. Diharapkan selain menggunakan penyebaran kuesioner juga melakukan wawancara secara langsung terhadap responden sehingga kesimpulan tidak hanya diambil berdasarkan data yang telah diambil melalui penggunaan instrumen penelitian secara tertulis tetapi juga mendapatkan informasi tambahan dari responden.

Dafar Pustaka

- Akhmad, Israwaty, Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan. 2018. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang:: *Jurnal ASPPPTMA*,89-103.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2017. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2018. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Br. Purba, Rahima. 2017. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar”: *Jurnal Vol.8 No.1,ISSN.2087-4669*, 99-111.
- Fajri, Djumali, Hartono “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Enrekang” *Jurnal Balance vo.XVI no.1*, 410-424. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: BP UNDIP Group.
- Gibson, Ivancevich. 1996. Organisasi (perilaku, struktur, proses), Jilid-1. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kuntadi, Cris. 2019. Audit Internal Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Kurniawan, Arief . 2018. “Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan”: *Jurnal*.

M.Ihksan. 2016. Administarsi Keuangan Publik. Jakarta; Universitas Terbuka.

Mahayuni, Yuniarta, Julianto “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kab.Karang Asem” *Jurnal E-AK vol.8 No.2, 2017, Universitas Ganeshaa,*

Mahmudi. Mahmudi. 2009. Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta.

Marakas, George M dan O'brien, James A. 2017. Pengantar Sistem Infromasi, Salemba Empat, Jakarta

Mardiasmo, (2006), Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.

Mutiana, Liza. 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara”: *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol.3 ISSN.2502-6976,151-167.*

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor. PER-6/AG/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran / Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor. P.19/PHPL-SET/2015) Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Pengganti Nilai Tegakan , Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin USaha Pemanfaatan Hutan Melalui Simponi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, , Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksplotasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Purwanto,Aagus Joko. 2016. Modul : Teori Organisasi, Cetakan ke- 5.Banten:Universitas Terbuka.

Raharjo, Sahid. Channel Youtube SPSS.

- Raharjo, Sahid; 2020.Olah Data Statistik dengan SPSS. Online (www.spssindonesia.com) diakses 4 Oktober 2020.
- Sa'adah, Khotimahtus. 2018. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Moderasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi": *Jurnal*.
- Santoso, Elli Budi.2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.* (Studi Empiris Lampung Timur). Bandar Lampung: Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
- Sedarmayanti. 2009, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.Bandung: Mandar Maju.
- Sihaloho, Dian Meyliana. 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara*, Medan: Program Studi Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Silaban, Nur Evelyn. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. Medan: Program Studi Ilmu Akuntansi pada Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Siregar,Syofian. 2017.Metode Penelitian Kunatitatif, Cetakan ke-4. Jakarta; Kencana.
- Sugiyono. 2013. Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung; Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia,Cetakan ke-9.Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wahjono, Sentot Imam. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan ke-2. Jakarta Salemba Empat.
- Yulia & Rahmat, Fauzi. 2018.Diktat, Sistem Informasi Manajemen. Batam: Universitas Putera Batam.